

## PEMBERDAYAAN PETERNAK SAPI PERAH MELALUI KREDIT IMPLIKASINYA TERHADAP DISTRIBUSI PENDAPATAN

Oleh :

Endang Siti Rahayu \*)

### Abstrak

Dalam rangka meningkatkan kinerja ekonomi, maka prioritas pemerintah dalam upaya pengembangan unit-unit produksi di tingkat usaha kecil menengah di semua sektor adalah memberikan dukungan perluasan akses terhadap kredit sebagai jawaban terhadap kemandegan perbankan dan sektor lembaga keuangan lainnya. Salah satu sektor yang dijadikan sasaran dalam upaya itu adalah UKM sektor pertanian yaitu di subsektor peternakan dengan kucuran kredit untuk peternak sapi perah melalui skim kredit KKPA yang disalurkan oleh perbankan di Kabupaten Boyolali. Pemberdayaan petani peternak sapi perah melalui skim kredit tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi dimana dalam masa krisis sektor pertanian telah terbukti mampu bertahan terhadap badai krisis dan kebutuhan akan produksi susu yang semakin meningkat. Pemberdayaan itu dimaksudkan untuk merangsang kembali roda perekonomian di pedesaan, menaikkan pendapatan bagi petani peternak supaya mampu keluar dari krisis. Kajian ini mencoba menelaah program itu apakah memberikan dampak yang positif terhadap kenaikan pendapatan dan mampu menggeser ketimpangan pendapatan di kalangan peternak, karena fenomena yang ada menunjukkan bahwa kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki peternak beragam sehingga dengan program itu diharapkan akan menjadi salah satu perekat dalam menghilangkan adanya gap yang cukup tajam diantara peternak.

**Kata kunci :** petani peternak, sapi perah, pemberdayaan, kredit, pendapatan.

\*) Dosen Fakultas Pertanian UNS Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian

### A. PENDAHULUAN

Usaha sapi perah termasuk salah satu bentuk UKM yang ada di sektor pertanian. Sebagai UKM, usaha sapi perah merupakan salah satu sasaran yang dianggap **feasible** bagi perbankan untuk pengucuran kredit. Hal itu sejalan dengan keinginan pemerintah dalam upaya pengembangan UKM untuk

meningkatkan kinerja ekonomi dengan memberikan dukungan perluasan akses terhadap kredit sebagai jawaban dari kemandegan sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Kebijakan pemerintah tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa salah satu permasalahan dari peternak sapi perah adalah masalah permodalan dan

permodalan dianggap sebagai salah satu kunci dalam upaya pemberdayaan petani sapi perah. Di sisi lain akses peternak sapi perah terhadap sumber-sumber permodalan terbatas. Dalam kondisi itulah maka kucuran kredit kepada peternak sapi perah melalui skim kredit KKPA yang disalurkan kepada petani melalui KUD di Kabupaten Boyolal memberikan insentif bagi petani peternak untuk meningkatkan produksinya.

Disadari sepenuhnya oleh petani peternak bahwa kucuran kredit tersebut mampu menggairahkan kembali usaha persusuan di kalangan peternak walaupun terbatas jumlah petani yang menerima kredit tersebut. Pertimbangan yang digunakan untuk menerima kucuran kredit tersebut karena mereka harus mampu meningkatkan produksi susu dan pendapatannya dalam rangka memenuhi permintaan susu yang dirasakan semakin meningkat. Sebagai gambaran besarnya permintaan susu secara nasional untuk konsumsi susu di Indonesia pada tahun 1997 sebesar 495.000 ton sedangkan produksinya hanya 62.300 ton, sehingga produksi susu nasional hanya mampu memenuhi permintaan susu sebesar 12,58% (Anonimous, 1999) . Sedangkan di Kabupaten Boyolali seperti dikutip dari

Sakuntala ( 2002) bahwa Kabupaten Boyolali merupakan salah satu sentra susu di Jawa Tengah dan sampai tahun 2001 terdapat populasi sapi perah 55.208 ekor dengan jumlah populasi sapi produktif 19.866 ekor dan jumlah peternak sebanyak 19.095 orang. Dari jumlah itu produksi susu yang dihasilkan mencapai 64.248 liter/hari , sehingga total produksi susu tersebut mampu memberikan sharing sebesar 51,9% terhadap total produksi di Jawa Tengah.

Fenomena yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan peternak untuk pengadaan sapi bibit merupakan kendala untuk melanjutkan usaha ternaknya. Hal itu disebabkan terbatasnya kemampuan petani dalam permodalan dan rendahnya akses terhadap sumber permodalan yang ada. Adanya kucuran kredit melalui KKPA merupakan salah satu bentuk program pemerintah untuk memberdayakan petani peternak . Dengan demikian fungsi kredit bagi usaha sapi perah menjadi sangat penting dalam menunjang upaya peningkatan produksi susu di Kabupaten Boyolali mengingat bahwa dalam usahanya petani peternak selalu terkendala dalam penyediaan modal.

## B. PERMASALAHAN

Salah satu permasalahan yang muncul dalam upaya peningkatan produksi susu adalah rendahnya populasi sapi perah, sedangkan di lain pihak kemampuan petani peternak untuk menambah jumlah populasi ternak terkendala pada terbatasnya modal yang dimiliki untuk pengadaan bibit sapi. Karena itu adanya program pemberdayaan petani peternak sapi perah melalui skim kredit KKPA sangat membantu sekali bagi petani dalam menambah jumlah populasi sapi perah. Walaupun program tersebut hanya mencakup sedikit peternak tetapi mampu menggairahkan usaha sapi perah, namun apakah adanya program KKPA tersebut mampu meningkatkan pendapatan petani dan mampu memberikan pemerataan pendapatan diantara petani peternak sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam upaya pemberdayaan, perlu kajian yang mendalam tentang dampak program KKPA tersebut.

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian dirancang dalam bentuk teknik survai dengan sasaran

petani peternak penerima kredit sebagai responden dan peternak non-kredit sebagai pembanding. Pengambilan sampel dilakukan secara *simple random sampling* sebanyak 30 patani peternak dengan menggunakan panduan kuesener. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dilakukan indept interview. Teknik analisis dengan menggunakan tabulasi sederhana, distribusi frekuensi, analisis biaya pendapatan. Mengingat pentingnya distribusi pendapatan dalam upaya mencari solusi dalam rangka pemberdayaan lebih lanjut, maka digunakan analisis distribusi pendapatan dengan pendekatan Gini Index yaitu dengan penggolongan konsentrasi berdasarkan lima kelompok berselang sama ( 20%) untuk tiap golongan. Sejalan dengan pemikiran Sen (1973) seperti dikutip oleh Simatupang ( 1989), bahwa setiap ukuran positif ketimpangan pembagian pendapatan terkandung secara implisit bentuk fungsi kesejahteraan sosial dan Gini Index secara implisit berhubungan dengan fungsi kesejahteraan tersebut. Atas dasar itu maka pendekatan Gini Index dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$W = Y ( I + G ) \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan : W = kesejahteraan sosial  
 Y = rata-rata pendapatan  
 G = index Gini

Index Gini dihitung dengan menggunakan rumus :

$$G = \frac{i / N \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (Y_i - Y_j)}{2Y} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

y = pendapatan dari unit ke i atau j

N = jumlah unit

Apabila data yang tersedia adalah kelompok (selang) maka Gini Index dapat diduga dengan rumus sebagai berikut :

$$GI = 1 - \sum_{i=1}^n (P_n)(Q_n + Q_n - 1) \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan : GI = Gini Index

n = jumlah kelompok

P<sub>n</sub> = pangsa unit penerima kelompok

Q<sub>n</sub> = pangsa kumulatif pendapatan untuk kelompok n

Nilai Gini Index berkisar 0 – 1. Nilai 0 berarti bahwa pendapatan merata sempurna dan nilai 1 berarti timpang sempurna. Namun dalam dunia nyata kesua kasus tersebut jarang ditemui, karena itu untuk menggolongkan tingkat ketimpangan pendapatan digunakan pendekatan Oshima ( 1978) seperti

dikutip Yuni dkk ( 1988) dengan kisaran sebagai berikut : (1) timpang ringan bila Gini Index < 0,4, (2) timpang sedang bila Gini Index 0,4 – 0,5 dan (3) timpang berat bila Gini Index > 0,5.

Pendekatan ini sekaligus untuk melihat besarnya dampak kredit terhadap pergeseran ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan peternak.

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Karakteristik Responden**

Sebagaimana dikemukakan oleh Sumodiningrat ( 1997) bahwa kendala yang membatasi perkreditan dan modal ventura tidak menjangkau usaha kecil menengah dan mikro karena dinilai tidak memenuhi kualifikasi perbankan dan dianggap tidak “bankable”. Disamping itu orientasi lembaga keuangan yang memberikan kredit umumnya berpedoman pada prinsip pelayanan keuangan modern yang ketat dengan mengutamakan persyaratan. Berpijak pada pernyataan tersebut maka tidak mudah bagi peternak untuk mendapatkan kredit karena itu sebagian besar kredit yang dikucurkan adalah kredit program antara lain KKPA ( Kredit Koperasi Primer untuk Anggota). KKPA ini merupakan kredit modal kerja atau kredit

investasi untuk membiayai kegiatan produktif anggotanya. Walaupun merupakan kredit program tetapi persyaratan bagi nasabah tetap diberlakukan karena itu berkaitan dengan persyaratan dalam analisa kredit perlu diketahui tentang karakteristik responden.

Hasil kajian tentang ini diperoleh hasil bahwa rata-rata usia 46,87 tahun dengan variasi antara 20 – 57 tahun. Prosentase tertinggi masuk dalam kategori usia produktif yaitu antara 40 – 49 tahun. Dilihat dari tingkat pendidikan rata-rata peternak tertinggi adalah tamat SD ( 66,67%), sedangkan pendidikan > SLTP ( atau SLTP ke atas ) hanya 10%. Dengan demikian secara merata tingkat pendidikan sangat rendah. Jumlah anggota keluarga rata-rata 5,13 orang termasuk cukup tinggi. Kondisi ini dapat berpengaruh negatif maupun positif dalam pelaksanaan KKPA, berpengaruh negatif apabila jumlah anggota cukup besar akan paralel dengan jumlah kebutuhan biaya keluarga sehingga dapat mengganggu kelancaran dalam proses pembayaran

kredit, pengaruh positifnya akan membantu dalam efisiensi usaha ternak dalam penyediaan tenaga kerja keluarga. Karakteristik peternak lain yang penting adalah pengalaman dalam menjalankan usaha ternak. Hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata peternak memiliki pengalaman dalam usaha sapi perah rata-rata 14,67 tahun . Implikasinya ketrampilan yang dimiliki menjadi jaminan yang cukup feasible dalam pengelolaan usaha ternak sapi perah.

## 2. Kebutuhan Kredit pada Usaha Sapi Perah

Pendekatan biaya usaha sapi perah merupakan pendekatan yang realistis. Model pendekatan ini merupakan model pendekatan tidak langsung yang menempatkan kredit sebagai sumber likuid pengadaan input faktor dalam usaha ternak, sehingga akan berpengaruh pada output yang akan dikeluarkan. Semakin tinggi pembiayaan semakin tinggi kebutuhan akan kredit. Hasil kajian tentang kebutuhan kredit bagi peternak dengan pendekatan biaya usaha ternak dapat dilihat pada tabel : 1.

Tabel : 1.

## Kebutuhan Kredit bagi Peternak Sapi Perah

| No                 | Komponen biaya | Besarnya biaya (Rp) | Prosentase terhadap total biaya (%) |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1.                 | Bibit sapi     | 1.506.601           | 48,51                               |
| 2.                 | Pakan ternak   | 1.402.173           | 45,15                               |
| 3.                 | Obat-obatan    | 15.770              | 0,51                                |
| 4.                 | Perawatan      | 16.740              | 0,54                                |
| 5.                 | Peralatan      | 33.850              | 1,09                                |
| 6.                 | Lain-lain      | 130.796             | 4,20                                |
| <b>J u m l a h</b> |                | <b>3.105.929</b>    | <b>100,00</b>                       |

Sumber Data : Analisis Data Primer

Dengan pendekatan tidak langsung maka kebutuhan kredit bagi peternak sapi perah mencapai Rp 3.105.929. Komponen terbesar adalah untuk pengadaan bibit sapi sedangkan pengadaan ini termasuk dalam kategori modal kerja bagi peternak dan harus ada pada awal kegiatan usaha dilakukan. Keperluan untuk pengadaan sapi ini mencapai 48,51% dari total biaya. Dalam kucuran kredit melalui KKPA hanya mencakup kredit modal kerja ini sehingga dari kebutuhan kredit peternak hanya mampu dipenuhi melalui kredit sebesar 48,51%. Kekurangannya sebesar 51,49% harus dibiayai sendiri secara swadaya oleh petani. Kondisi ini akan berpengaruh pada pengelolaan usaha karena keterbatasan dalam modal

sendiri sering menjadi kendala. Kendala yang tidak kalah pentingnya adalah pembiayaan untuk pakan, dimana kebutuhan pakan ini merupakan komponen besar kedua setelah bibit sapi dan pembiayaan ini akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas susu yang dihasilkan.

Mencermati kredit KKPA ini sebenarnya merupakan salah satu program untuk mengangkat kesejahteraan peternak, namun sering dijumpai permasalahan yang tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan dalam praktek. Skim kredit KKPA diperuntukkan bagi Koperasi Primer bagi anggotanya dengan ketentuan masing-masing anggota maksimum sebesar Rp 30 juta dengan bunga 16% per tahun

sudah termasuk fee untuk koperasi primer sebesar 3%. Apabila kenyataan dilapangan kebutuhan kredit peternak hanya sekitar Rp 3 juta – Rp 5 juta mestinya kebutuhan kredit tersebut tercukupi dari platform yang ditentukan, tetapi peternak hanya mampu menerima kucuran kredit jauh dibawah platform. Hasil kajian tentang ini diperoleh temuan bahwa proses dan prosedur pengajuan dan realisasi kredit dirasakan cukup lama dan berbelit, disamping peternak sebagian besar tidak memiliki agunan. Dengan demikian permasalahan kredit bagi peternak dan usaha kecil lainnya akan selalu berkisar dengan alasan yang klasik yaitu masalah persyaratan, prosedur dan agunan (*collateral*).

### **3. Dampak Kredit Terhadap Pendapatan dan Distribusinya**

Efektivitas kebijakan pembangunan di sektor pertanian perlu ditelaah lebih lanjut untuk melihat perubahan struktur pendapatan masyarakat pedesaan. Program bantuan

skim kredit KKPA merupakan salah satu kebijakan pembangunan pertanian di bidang peternakan yang salah satunya diaplikasikan di Kabupaten Boyolali. Untuk melihat perubahan yang terjadi terhadap kebijakan kredit tersebut salah satunya dapat dilihat dari perubahan pendapatan peternak yang menerima program dan non-penerima program sebagai pembanding. Akibat dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi cara pengelolaan usaha ternak, sehingga peternak penerima kredit akan lebih intensif dalam pemeliharaan dan pengelolaannya. Tindakan itu disebabkan karena dengan adanya kredit dapat menjadi beban bagi usahanya sehingga mereka akan berusaha untuk memperoleh pendapatan lebih besar untuk membayar kredit dan beban bunga. Untuk melihat apakah hipotesisi itu benar bahwa tindakan mereka memang berpengaruh terhadap biaya dan penerimaan serta pendapatan usaha ternak sapi perah sebagai dampak dari kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel : 2.

Tabel : 2  
Dampak Perubahan Pendapatan Peternak dari Kebijakan Kredit KKPA

| No | Uraian     | Penerima kredit | Non-kredit | Perubahan |
|----|------------|-----------------|------------|-----------|
| 1. | Penrimaan  | 4.112.490       | 3.474.628  | 647.862   |
| 2. | Biaya      | 2.855.396       | 2.415.785  | 439.611   |
| 3. | Pendapatan | 1.267.094       | 1.058.843  | 208.251   |

Sumber Data : Analisis Data Primer

Atas dasar tabel diatas terlihat bahwa peternak penerima kredit terbukti melakukan usahanya dengan lebih intensif dibandingkan dengan yang non-penerima kredit. Terlihat dalam pembiayaan peternak kredit mengeluarkan biaya ( cost) lebih besar dengan selisih biaya sebesar Rp 439.611 ( 15,39%). Kenaikkan dalam pengeluaran biaya dari peternak kredit diikuti oleh kenaikan penerimaan dan pendapatan , dengan kenaikan masing-masing Rp 647.862 ( 15,71%) dan Rp 208.251 ( 16,43 ). Secara ekonomis tambahan biaya yang dikeluarkan ( MC) memberikan tambahan penerimaan ( MR ) yang lebih besar . Dari keadaan ini dapat dikatakan bahwa kebijakan kredit KKPA memberikan dampak positif terhadap pendapatan sebesar 16,43%. Hasil yang sama dilakukan oleh Sakuntala ( 2001 ) dengan menggunakan Uji T-test menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan yang diperoleh sebagai dampak kebijakan

kredit KKPA pada usaha sapi perah memberikan hasil berbeda nyata ( signifikan ) dengan tingkat kesalahan @ = 5%.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rasahan ( 1988 ) bahwa setiap terjadi perubahan lingkungan ekonomi termasuk dalam perubahan kebijakan maka masyarakat pedesaan akan memanfaatkan fenomena itu untuk memaksimalkan penggunaan sumberdaya yang dimiliki. Dalam hubungannya dengan kebijakan kredit KKPA maka peternak penerima kredit juga akan memanfaatkan sumberdaya tersebut dalam rangka memaksimalkan kepemilikan sumberdaya tersebut untuk mengoptimalkan pendapatannya. Berhubungan dengan ini akan sangat membantu untuk mempelajari dampak dari kebijakan kredit KKPA melalui distribusi pendapatan dari pemilik faktor-faktor produksi. Hasil kajian tentang dampak kebijakan kredit KKPA

terhadap distribusi pendapatan peternak dapat dilihat pada tabel : 2.

Tabel : 2.

Analisis Distribusi Pendapatan Dengan Pendekatan Gini Index

| No | Kelompok RT pendapatan terendah-tertinggi | Prosentase kelompok RT | Rata-rata pendapatan peternak kredit | Rata-rata pendapatan peternak non-kredit |
|----|---|------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | I   | 20%                    | 625.253                              | 373.584                                  |
| 2. | II  | 20%                    | 955.302                              | 820.578                                  |
| 3. | III                                       | 20%                    | 1.231.102                            | 1.097.553                                |
| 4. | IV  | 20%                    | 1.538.235                            | 1.397.296                                |
| 5. | V   | 20%                    | 1.767.570                            | 1.604.383                                |
|    | <b>GI *)</b>                              |                        | <b>0,494</b>                         | <b>0,527</b>                             |

Sumber Data : Analisis Data Primer

Keterangan : \*) GI = Gini Index

Berdasarkan hasil analisis ternyata kebijakan kredit KKPA bagi peternak sangat bermanfaat sebagai tambahan permodalan dan mampu meningkatkan pendapatan. Kenaikan pendapatan tersebut telah memberikan hasil dalam memperbaiki ketimpangan pendapatan peternak yaitu dari nilai GI = 0,527 ( timpang berat) menjadi GI = 0,494 ( timpang sedang ). Dengan demikian maka dampak bantuan kredit KKPA memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi peternak sapi perah dan kesenjangan dalam pendapatan yang ada di daerah pedesaan semakin dapat diperkecil.

## E. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Program pemberdayaan peternak melalui kredit KKPA telah memberikan dampak yang positif bagi kehidupan peternak sapi perah di Kabupaten Boyolali. Indikasi yang dapat dilihat sebagai dampak positif dari kebijakan kredit tersebut adalah dengan naiknya pendapatan peternak sebesar 16,43%. Namun kenaikan ini diimbangi dengan intensitas pengelolaan yang lebih baik dari kualitas pakan yang diberikan, sehingga memberikan konsekuensi bagi kenaikan biaya ( cost) yang dikeluarkan dalam usaha ternak sapi perah. Kenaikan pendapatan ini juga mampu memberikan

nilai tambah bagi kesejahteraan peternak sapi perah dengan indikasi semakin berkurangnya ketimpangan/distribusi pendapatan yang ada yaitu dari nilai Gini Index = 0,527 ( timpang berat ) menjadi GI = 0,494 ( timpang sedang).

Dengan demikian maka hasil kajian ini memberikan implikasi bahwa program pengadaan kredit bagi peternak mampu memberikan rangsangan bagi peternak sapi perah dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonominya. Dari kondisi ini maka perluasan dan pengembangan skim kredit lunak bagi peternak sangat diperlukan dan bermanfaat untuk menggerakkan roda ekonomi peternak. Apabila ini direspon oleh pemerintah maka upaya peningkatan produksi susu akan tidak akan mengalami kendala berat.

Rekomendasi dari hasil kajian ini adalah bahwa pemerintah harus mampu mengalokasikan kembali kredit program untuk peternak. Memberikan insentif bagi perbankan dan lembaga keuangan untuk menyediakan kredit murah dan terjangkau bagi peternak dengan prosedur mudah dan cepat. Sedangkan bagi peternak perlu adanya pendampingan dan pembinaan dalam kegiatan usahanya supaya mampu mengakses terhadap perbankan dan

lembaga keuangan lainnya. Dengan kata lain peternak harus siap untuk mengelola usahanya supaya *feasible* dan *bankable* sebagai sarana untuk mengakses perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

## F. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Suryana, 1985. *Perencanaan Nasional Dalam Pengembangan Agribisnis di Indonesia*, Majalah Pangan No 24 Vol IV- 1985.

Anonymous, 1999. *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Usaha Persusuan Secara Integral*. Makalah pada Lokakarya Perencanaan Strategis Koperasi Persusuan, GKSI dan Canadian Cooperative Association ( CCA), Departemen pertanian Dit-Jen Peternakan, Depok, Jakarta.

-----, 2000 *Kabupaten Boyolali Dalam Angka*, Bappeda dan BPS, Boyolali

-----, 2000. *Jawa Tengah Dalam Angka*, BPS Propinsi Jawa Tengah, Semarang

Bank Indonesia, 1997. *Sejarah Peranan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Kecil*, BI- Urusan Kredit, Jakarta.

----- 1998. *Materi Pelatihan Petugas Pendamping Usaha Mikro*, BI-Asian Development Bank, Jakarta.

Bungaran saragih, 1998. *Strategi Pengembangan Pertanian Pasca Orde Baru*, Usahawan Indonesia No 10/TH XXVII Oktober 1998.

Chotim, Erna Ermawati, 1997. *Diskusi Ahli : Pemberdayaan dan Replika Aspek*

*Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, Yayasan Akatiga, Bandung.

Clapham Ronald, 1991. *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta.

Chrisman Silitonga, 1995. *Kebijakan pemerintah Dalam Pengembangan Agribisnis*, Majalah Pangan No 24 Vol IV-1985.

Dawam Raharjo, 2000. *Apresiasi Pembinaan Industri dan Dagang Kecil*, Makalah dalam Kegiatan Apresiasi Pengembangan Jaringan. Lembaga Perguruan Tinggi Pembina IPKM di Yogyakarta, 25-26 September 2000

-----, 2001. *Kebijakan Daerah Dalam Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Mengantisipasi Era Globalisasi*. Makalah Seminar Sewindu PERSEPSI, Klaten 28 April 2001.

-----, 2001. *Industri Kecil dan Dimensi Pemerataan*, Usahawan No 09/TH XXX September 2001, FE-UI, Jakarta.

Gunawan Sumodiningrat, 1987. *Prospek Petani Kecil dalam Prospek Pedesaan* 1987, P3PK-UGM, Yogyakarta.

-----, 1997. *Pelayanan Kredit Untuk Masyarakat Lapisan Bawah dalam Pemberdayaan dan Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, Yayasan Akatiga, Bandung.

-----, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, PT. Gramedia Putaka Utama, Jakarta.

-----, 2001. *Kepemimpinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Pidato Guru Pengukuhan Besar pada Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 17 Maret 2001.

H.S. Dillon, 1998. *Strategi Pengembangan Pasar Agribisnis*, Usahawan Indonesia No 10/TH XXVI Oktober 1998.

Kustiah Kristanto, A Karim Saleh dan Sampe Perebonan, 1985. *Peranan Peternakan dan Pertanian Lahan Kering dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga dalam Peluang Kerja dan Berusaha Di Pedesaan*, BPFE untuk P3PK UGM, Yogyakarta.

Mubyarto, Loekman Sutrisno dan Gunawan Sumodiningrat, 1985. *Kredit Pedesaan dan Perannya Dalam Penciptaan Peluang Bekerja dan Berusaha dalam Peluang Kerja dan Berusaha Di Pedesaan*, BPFE untuk P3PK-UGM, Yogyakarta.

Rasahan Chairil, 1988. *Perspektif Struktur Pendapatan Masyarakat Pedesaan Dalam Hubungannya Dengan Kebijakan Pembangunan Pertanian*, Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi Pedesaan, Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.

Sakuntala D A, 2001. *Kajian Kredit Sapi perah Ditinjau Dari Pendapatan Peternak Di Kabupaten Boyolali ( Kasus KKPA Bank Niaga di Kecamatan Cepogo)*, Skripsi S-1, Fakultas pertanian UNS, Tidak diterbitkan

Simatupang Pantjar, 1988. *Metode Analisa Ekonomi Produksi, Konsumsi, Pendapatan dan Alokasi Tenaga Kerja Keluarga Tani*, Prosiding Patanas perubahan Ekonomi Pedesaan, Pusat

Penelitian Agro Ekonomi , Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.

Syaifudin, Hetifah, 1995. *Strategi dan Pengembangan Usaha Kecil*, Yayasan Akatiga, Bandung.

Syukur M, Rachman HP dan Pasaribu SM, 1988. *Pola dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Barat*, Proseding Patanas perubahan Ekonomi Pedesaan, Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.

Tabor Steven, HS Dillon dan Husein Sawit, 1998. *Food Security on The Road to Economic Recovery*, Agro Ekonomika No 2 Tahun XXVIII Oktober 1998, PERHEPI, Jakarta

Teuku Mirza dan Imbuh Sulistyarini, 1998. *Tinjauan Kebijakan Pembinaan Usaha Kredit oleh BUMN*, Manajemn Usahawan Indonesia No :07/TH XXVII Juli 1998.

Urata Hijiro, 2000. *Policy Recommendation for SME Promotion in Indonesia*, JICA Senior Advisor to Coordination Minister of Economy, Finance and Industry.